

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGAMEN JALANAN DI KOTA SERANG

Iip Mualip, Angga Rosidin
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email:7775210031@untirta.ac.id
7775210025@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kebijakan Penanganan Pengamen Jalanan Di Kota Serang)". Dalam penelitian ini berupaya memahami bagaimana implementasi kebijakan penanganan pengamen jalanan di Kota Serang dalam peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian Dinas sosial dan satuan pamong praja untuk secara bersama-sama menyiapkan sarana pendukung pelatihan bagi pengamen jalanan; Sumber daya dalam penanganan pengamen jalanan pemerintah Kota Serang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anakjalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan; Komunikasi antar badan pelaksana, sebagaimana dalam perda bahwa setiap instansi mengambil peran masing-masing dansaling bekerjasama dan menguatkan.

Kata kunci: pengamen jalanan, penyakit masyarakat, peraturan daerah

Abstract

This study aims to: Knowing how the implementation of the Mayor of Serang Regulation Number 41 of 2017 concerning the Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning the Prevention, Eradication and Management of Community Diseases (Policy for Handling Street Singers in Serang City)". This study seeks to understand how the implementation of the policy of handling street buskers in the city of Serang in the regional regulation of Serang City number 2 of 2010 concerning the prevention of eradication and control of community diseases. Therefore, the approach used in this study is a qualitative approach. Research results from the Social Service and Civil Service Units to jointly prepare training support facilities for street buskers; Resources in handling street buskers, Serang City government involves social institutions and street children observers to support policy implementation; Communication between implementing agencies, as in the regional regulation that each agency takes its own role and cooperates and strengthens each other

Keywords: street singers, community disease, local regulations

1. PENDAHULUAN

Anak Jalanan sebagai bagian dari persoalan publik dari tahun ke tahun tidak dapat terselesaikan disebabkan minimnya program berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang yang berorientasi pada program kerja dan penguatan kompetensi kreatifitas individu anak. Selain itu, sumberdaya penanganan

dan komunikasi antar instansi tidak terkoordinir dengan baik terutama dari segi tugas dan pokok penanganan. Kondisi itulah menyebabkan organisasi tidak berjalan dengan baik dalam menjalankan program Unicef dan Undang-undang Dasar 1945 dan pelaksanaan Undang-undang secara teknis dan secara aplikatif tertuang dalam peraturan daerah, dalam rangka

penanganan anak jalanan yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi anak jalanan.

Kota Serang merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Banten yang sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi tersebut. Berbagai permasalahan telah menjadi fenomena tersendiri yang butuh perhatian khusus untuk segera diatasi dengan cepat dan tepat, salah satunya terkait anak jalanan tersebut. Pengamen jalanan merupakan anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat pusat keramaian lainnya (Kementerian Sosial RI, diakses 22 Maret 2017).

Namun, sampai pada saat ini permasalahan anak jalanan ini tidak kunjung usai dimana masih banyak anak-anak (anak jalanan) berkeliaran yang membahayakan keselamatan mereka dan orang lain, mengganggu ketertiban dan estetika Kota Serang, banyak hak anak-anak (anak jalanan) yang terabaikan. Hal ini terlihat jelas jumlah anak jalanan di Kota Serang dari tahun ke tahun semakin meningkat. pertumbuhannya seperti dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Jumlah Pengamen jalanan pada tahun 2015 sebanyak 150 anak dan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 312 anak. Pada tahun 2015, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi berada di Kecamatan Serang yaitu sebanyak 60 anak dan Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 50 anak. Pada tahun 2016 tidak ada perubahan dimana Kecamatan Serang masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah anak jalanan yang semakin meningkat yaitu sebanyak 130 anak dan Kecamatan Kasemen sebanyak 29 anak

2. METODE

Perilaku, pemahan,, dan bentuk tindakan lain dari subjek penelitian dapat dipahami secara horistik melalui metode alamiah penelitian kualitatif (Moleong,

2017). Peneliti menjadi instrumen penting dalam penelitian ini.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak berstruktur.

2. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi atau dengan melakukan pengamatan. Observasi merupakan pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan lapangan di lokasi penelitian. Pengamatan sendiri dapat diklasifikasikan atas melalui cara berperanserta dan yang tidak berperanserta.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moelong (2002:16) mendefinisikan dokumen adalah setiap bahan tulisan ataupun film, lain dari record yang tak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sendiri bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi).

2.4 Model Penelitian

Uji kredibilitas data atau yang biasa disebut uji keabsahan dan reabilitas data memiliki keterkaitan antara deskripsi dan ekplanasi. Uji kredibilitas data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti (Prastowo, 2011:266). Untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check dan menggunakan bahan referensi (Prastowo, 2011:265). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik Triangulasi dan Member Check.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang melibatkan beberapa unsur konsep di atas diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait diantaranya dinas sosial dan tenaga kerja untuk secara bersama-sama menyiapkan sarana pendukung pelatihan bagi anak jalanan; Sumberdaya dalam penanganan anak jalanan pemerintah Kota Serang melibatkan lembaga- lembaga sosial dan pemerhati pengamen jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya dalam penanganan anak jalanan di kota Serang seperti sumber daya manusia diantaranya dari Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya perda memberikan pembatasan bahwa Tim adalah Tim pengendalian dan pengawasan Peraturan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Dinas Sosial atau Instansi dan pihak terkait lainnya. Selain itu dipertegas pula oleh Perda bahwa Pejabat yang berwenang adalah pejabat atau pegawai yang diberi tugas di bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Komunikasi antar badan pelaksana, sebagaimana dalam perda bahwa setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasama dan menguatkan, misalnya dinas sosial membina kader-kader pendampingan anakjalanan dan di integrasikan dengan dinas tenaga kerja dalam hal memberikan pelatihan kompetensi bagi anak jalanan. Hubungan Antar orgaisasi maupun antar OPD pemerintah mempunyai kewenangan untuk menangani pencapaian kebijakan pengentasan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani permasalahan anak jalanan melakukan kemitraan dengan pihak luar. Dalam hal ini mitra komunikasi antar lembaga penanganan anak jalanan. Diantaranya dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM), Lembaga yang bergerak di bidang sosial, Personal TAGANA, Karang Taruna, Panti Pemerintah, Panti Swasta, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM), Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM), Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan (TKSK). Kemitraan Dinas Sosial Kota Serang yang banyak menangani masalah anak jalanan yaitu dengan dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM).

Karakteristik dalam pelaksana dalam penanganan anak jalanan dibagi pelaksana penjangkaran dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan,

misalnya Satpol PP bekerjasama dengan dinas sosial. Karakteristik dalam suatu lembaga yang ada di Kota Serang ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat lalu dilaksanakan, seperti halnya Satpol PP Kota Serang, yang tujuannya adalah hanya sebagai eksekutor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lingkungan sosial ekonomi dan politik, penanganan anak jalanan dilakukan melalui pendekatan kebijakan dan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan kemudian dikembalikan pada

lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya; Sikap Pelaksana bagi instansi yang ditunjuk oleh perda dalam menangani anak jalanan dilakukan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.

Sikap pelaksana kebijakan penanganan anak jalanan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Intensitas disposisi para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, Kurang atau terbatasnya intensitas disposisi akan dapat menyebabkan gagalnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penanganan Pengamen jalanan yang melibatkan beberapa unsur diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait diantaranya

Dinas sosial dan satuan pamong praja untuk secara bersama-sama menyiapkan sarana pendukung pelatihan bagi pengamen jalanan; Sumber daya dalam penanganan pengamen jalanan

pemerintah Kota Serang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan; Komunikasi antar badan pelaksana, sebagaimana dalam perda bahwa setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasama dan menguatkan, misalnya dinas sosial membina kader-kader pendampingan anak jalanan dan di integrasikan dengan dinas tenaga kerja dalam hal memberikan pelatihan kompetensi bagi anak jalanan; Karakteristik dalam pelaksana dalam penanganan anak jalanan dibagi pelaksana penjarangan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan, misalnya Satpol PP bekerjasama dengan dinas sosial; Lingkungan sosial ekonomi dan politik, penanganan anak jalanan dilakukan melalui pendekatan kebijakan dan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan kemudian dikembalikan pada lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya; Sikap Pelaksana bagi instansi yang ditunjuk oleh perda dalam menangani anak jalanan dilakukan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasiru, Ronawaty. (2011). *Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar*, Sosiokonsepia, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2014). *Pemutakhiran data Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan*.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan

Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. (2005). *Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Jalanan*.

Dinas Sosial Kota Serang, (2014). *Pemutakhiran Data Hasil Reunifikasi Anak Jalanan, Dinas Sosial Kota Serang*.

Dinas Sosial Provinsi Banten, (2016). *Laporan Anak Jalanan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015. Dinsos Banten*.

Moleong, J. Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman., (1992), *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Univesitas Indonesia (UI Press).

Nugroho, Riant. (2012). *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta:Gramedia.

Ramadhan, Rizki Rahadian. (2014). *Implementasi peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Anak Jalanan Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomer 2, 2014: 2151-2160.

Rizzana, Sylfia. dkk. (2013). *Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang dan*

Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No.3, h 174-182, Tahun 2013.

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Van Meter, Donald and Carl E. Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, Department of Political Science. Ohio State University.

Purwoko, T., Kunci, K., Jalanan, A., & Faktor - Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan, A. (2013). *Analisis Faktor - Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan*. Sosiologi, 1(4), 13–25.

Ronawaty Anasiru. (2011). *Implementasi Model - model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Sosiokonsepsia, 16(02), 175–186

Ramadhani, S. (2016). *Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin*. Pendidikan Kewarganegaraan, 6(11), 947–954. Yogyakarta: Pustaka Belajar Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sururi, A. (2016). *Inovasi Kebijakan Publik, Tinjauan Konseptual dan Empiris*. Sawala Jurnal Administrasi Negara, 4(3), 1–14.